

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dan saran penulis berdasarkan pembahasan di atas:

1. Proses penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Illegal Drilling (Pengeboran Minyak Ilegal) Di Polda Jambi

Tidak ada satu organisasi pun yang memiliki sumber daya untuk memberantas sepenuhnya pengeboran sumur minyak ilegal. Perlu ada kerja sama antara lembaga pemerintah dan organisasi yang memiliki tujuan yang sama untuk menghilangkan praktik domestik dan internasional yang berbahaya. Investor dan mereka yang terkait dengan mereka akan ditangkap sehingga mereka dapat menerima tanggung jawab atas kejadian tersebut. Dia bahkan menangkap pejabat yang terlibat di Pemda. Meskipun kami menutup ratusan sumur, sepertinya hal itu terjadi lagi saat harga minyak naik. Dengan perlindungan hukum dan pendampingan penegak hukum, KUD dan BUMD akan kita berikan kemampuan untuk berperan aktif.

2. Kendala Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Illegal Drilling (Pengeboran Minyak Ilegal) Di Polda Jambi

Penghilangan dan penyitaan barang bukti sulit dilakukan karena medan yang terjal dan berlumpur. Untuk menghilangkan semua bukti dari tempat kejadian, polisi harus menggunakan peralatan dan kendaraan khusus.

Pasalnya, untuk sampai ke sini sulit, kata Tory, Rabu (7/9/2022), dan jelas kegiatan tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan alam yang luar biasa. Dan kami akan menyelidiki ini secara menyeluruh, termasuk menanyai sebelas tersangka yang kami tahan. Soalnya, iklim investasi hulu migas yang coba diciptakan pemerintah terhambat dengan adanya aktivitas pengeboran sumur gelap.

3. Upaya Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Illegal Drilling (Pengeboran Minyak Ilegal) Di Polda Jambi

Dampak dan risiko kegiatan pengeboran liar yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan lingkungan daerah menjadi motivasi kampanye himbauan ini. Spanduk bertuliskan "Ayo Kanti-Kanti, kita jago bersama" dipasang di lokasi pengeboran haram itu. Alam Bersamaan Bak Regam dari operasi pengeboran yang tidak sah sekarang juga; menghindari masalah hukum. Bupati membuat argumen yang meyakinkan untuk mendukung perjalanan ke lokasi pengeboran minyak sebelum mengeluarkan perintah tersebut.

Kami juga telah menutup ratusan sumur, tetapi situasi tampaknya menjadi tidak terkendali ketika harga minyak naik. Kami akan memberikan KUD dan BUMD kemampuan untuk terlibat dalam perlindungan penegakan hukum di pihak mereka. Harga jual minyak dari penambang ke Pertamina merupakan salah satu aspek terpenting yang akan diatur dalam amandemen undang-undang tersebut. Karena larangan yang belum tegas, kasus pengeboran sumur minyak yang melanggar hukum terus terjadi. Disarankan agar peraturan

tersebut secara eksplisit menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga daerah masing-masing. Kirimkan detektif untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sumur minyak yang melanggar hukum harus ditutup, dan kami berharap pemerintah federal dan lokal mengambil langkah bersama ke arah itu. Pembentukan Tim Gabungan instansi terkait yang dikoordinir Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menghentikan aktivitas sumur ilegal dan mengatur Tata Kelola Eksploitasi Sumur Bekas Ilegal hanyalah salah satu dari sekian banyak usulan SKK Migas yang dapat dijadikan masukan dalam rangka penanganan pengeboran sumur ilegal. Hanya dari sisi hulu, kegiatan migas ilegal ini juga memerlukan perhatian yang cukup besar di sisi hilir.

Ancaman pidana maksimal bagi pengebor minyak ilegal adalah 6 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perubahan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

B. Saran

Temuan penelitian merupakan tantangan di lapangan, dan penulis menawarkan saran berdasarkan permasalahan tersebut.

1. Aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan terhadap pengeboran ilegal harus berkonsultasi dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga hukuman yang sesuai dapat dikenakan. Pemerintah di semua tingkatan harus bekerja sama untuk memperingatkan warga tentang

bahaya terlibat dalam pengeboran atau pengeboran minyak yang melanggar hukum.

2. Kendala dalam penanganan illegal drilling /pengeboran minyak hendaklah aparat penegak hukum terus membrantas terhadap para pelaku jangan sampai mereka lolos dari jeratan hukum dan memberikan sanksi yang berat terhadap para pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan.
3. Upaya harus dilakukan dalam proses investigasi terlepas dari siapa yang bertanggung jawab atas pembakaran minyak ilegal tersebut; mereka yang bertanggung jawab harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Razia terhadap desa-desa yang melakukan pengeboran liar harus dilakukan, dan pelakunya harus ditangkap, terutama di wilayah Batanghari yang rawan pengeboran ilegal.

